

a. Kelayakan untuk Insentif Pengembangan Kilang Baru

Tim: Holisoh

Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Teknologi Proses

Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi, email: holisoh@lemigas.esdm.go.id

Tujuan penelitian adalah mengkaji beberapa alternatif pembangunan kilang di Indonesia dan merekomendasikan alternatif terbaik yang dianggap layak dan mampu dilaksanakan, termasuk dengan pola pendanaan oleh Pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM dewasa ini yang sudah mencapai sekitar 1,2 juta barel per hari, pemerintah Indonesia harus melakukan impor BBM yang sangat besar yaitu sekitar 580 ribu bph. Situasi ini sangat memberatkan beban fiskal Pemerintah dan membuat rentan ketahanan energi nasional.

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia saat ini memerlukan tambahan kilang baru yang mampu memproduksi BBM minimal 580 ribu bph atau setara dengan dua kapasitas kilang minyak baru masing-masing dengan kapasitas 300 ribu bph. Sedangkan pada tahun 2025, apabila tidak ada pembangunan kilang baru sebelumnya, diperlukan tambahan tiga kilang lagi masing-masing dengan kapasitas 300 ribu bph.

Kilang baru sebaiknya dirancang menggunakan minyak berat, karena ketersediaan minyak ringan makin terbatas, sehingga harganya diperkirakan akan makin mahal. Minyak Espo dari Rusia meskipun termasuk *light crude*, saat ini dan hanya untuk beberapa tahun kedepan diperkirakan masih akan dijual dengan *discount* karena masih belum banyak peminat dan hubungan politik Rusia dengan dunia Barat.

Kilang dirancang dengan konfigurasi yang dapat menghasilkan produk-produk BBM dengan spesifikasi internasional yang mengikuti standar Euro 4. Konfigurasi kilang minyak yang terintegrasi dengan kilang petrokimia pada umumnya dapat meningkatkan marjin kilang.

Kilang swasta memberikan IRR sebesar 4,36 % tanpa insentif dari pemerintah. Dengan insentif (*tax allowance* atau *tax holiday* dan pembebasan PPN barang kena pajak strategis), IRR akan meningkat menjadi 5-5,32 %. Namun inipun belum cukup menarik untuk investor swasta, yang memerlukan IRR minimum sebesar 12 %.

Skema kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) memberikan IRR sebesar 12,93% tanpa insentif, pemberian insentif dapat meningkatkan IRR menjadi sekitar 15-17%. Kenaikan IRR ini diakibatkan oleh 70% *equity* merupakan dana pemerintah sehingga suku bunga bank menjadi BI rate yang diasumsikan sebesar 7,5%. Meskipun demikian, kemungkinan pelaksanaan pendanaan secara KPS akan memerlukan proses dan waktu cukup panjang.

Pembiayaan oleh Pemerintah seluruhnya dapat memberikan IRR 7,22 %. Ini akan menarik apabila Pemerintah dapat menjual obligasi valas atau Sukuk valas/obligasi syariah yang dimasa lalu dengan kupon/imbal jasa lebih rendah dari 6% dan menurun.

Pembangunan kilang baru juga dapat meningkatkan ketahanan energi berupa cadangan BBM nasional dengan sekitar 0,9 hari. Jika dikuantifikasi, ini memberikan manfaat senilai Rp. 2,8 triliun, berdasarkan biaya yang diperlukan untuk mengadakan cadangan tersebut.

Pembangunan kilang baru memberikan dampak positif yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Perhitungan dengan metode Input- Output (IO), dapat memperkirakan masukan nilai aktivitas ekonomi dari proyek ini berupa dampak kepada PDRB, penerimaan pajak dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan kilang ini diperkirakan memberikan nilai masukan sekitar Rp. 546,266 trilyun, yang cukup besar dibanding investasi sebesar Rp 94 trilyun. Di lihat dari sisi *Benefit Cost Ratio* (BCR), diperoleh BCR sebesar 3,32.##